

PENDIDIKAN NASIONAL : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN¹

Oleh : Angelina Sondakh, SE²

KATA PENGANTAR

Sistem pendidikan nasional kita, pada dasarnya mempunyai sejarah yang cukup panjang dan kompleks. Ia dapat kita telusuri dari semenjak jaman sebelum penjajahan, pada masa penjajahan maupun masa kemerdekaan.

Dimasa sebelum penjajahan, dalam tingkat yang paling sederhana pola-pola pendidikan informal telah mulai diperkenalkan seiring dengan masuknya agama Islam di negeri ini, melalui surau-surau yang diajarkan oleh para Ustad dan Kyai hingga berkembang dalam bentuk pondok-pondok pesantren yang menyebar hampir diseluruh pelosok negeri.

Pada masa penjajahan kolonialisme Belanda, pendidikan formal mulai diperkenalkan pada awal abad 19, walaupun masih untuk kalangan terbatas. Kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan nasional yang lebih bersifat umum dan meluas setelah Budi Utomo dicanangkan pada tahun 1908.

Pasca kemerdekaan, dunia pendidikan kita berkembang cukup pesat dengan memberi peluang yang seluas-luasnya bagi anak bangsa untuk meraih jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya. Namun dalam perjalanan yang cukup panjang ini, nampaknya pendidikan nasional kita sampai saat ini, belum mampu melahirkan sebuah sistem pendidikan nasional yang benar-benar mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Berbagai bentuk kendala masih banyak kita hadapi, mulai masalah anggaran pendidikan yang belum maksimal, kualitas guru yang belum memadai³ maupun strategi kebijakan yang dirasakan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Kekerasan yang akhir-akhir ini muncul dalam dunia pendidikan kita, merupakan sebuah masalah krusial yang sangat memprihatinkan dan harus segera di akhiri agar dunia

¹ Disampaikan dalam Seminar Nasional " Quo vadis Pendidikan : menelisik Kasus Kekerasan dalam praksis pendidikan di IPDN, Semarang 14 Juni 2007.

² Angelina Sondakh adalah anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Demokrat. Diangkat menjadi Duta Orangutan oleh OUREI (**O**rangutan **R**epublik **E**ducation **I**nisiative) yang berpusat di Santa Monica, USA, Duta Gemar Membaca, Duta Keraton Surakarta, Duta Batik Rakyat serta Duta Gerakan Gemar membaca Komnas Perlindungan Anak, Pimpinan Seto Mulyadi. Pendiri WOMAN (*Women Act for Humanity and Environment*) dan aktif di berbagai LSM yang bergerak di bidang lingkungan, pariwisata maupun kepemudaan.

³ Lihat *Tabel 1*

pendidikan kita tidak semakin tercemar oleh oleh premasime yang pada akhirnya akan memperburuk dalam dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Era globalisasi yang terjadi saat ini, menuntut paradigma baru dalam dunia pendidikan nasional kita, sehingga dapat melahirkan manusia Indonesia seutuhnya yang tidak hanya handal dalam penguasaan ilmu pengetahuan maupun teknologi, tetapi memiliki integritas moral yang baik serta rasa humanisme yang tinggi.

REALITAS DUNIA PENDIDIKAN KITA

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan baru-baru ini, berdasarkan tes yang dilakukan oleh TIMSS (*Trends in International Mathematics and Sciences Study*) tahun 2003, menunjukkan bahwa para siswa SLTP kelas 2 kita, menempati urutan ke 34, jauh dibawah Singapura dan Malaysia yang menempati urutan pertama dan ke sepuluh, pada penilaian kemampuan matematika.

Hal yang tidak jauh berbeda, terjadi pula pada penguasaan atas ilmu pengetahuan. Tes yang dilakukan dibawah payung AAEI (*Association for Evaluation of Educational Achievement*) ini, kembali menempatkan siswa Indonesia pada urutan ke 36, dibawah Mesir dan Palestina yang berada satu peringkat di atasnya. Sedangkan Negara tetangga Singapura dan Malaysia, masih menempati urutan pertama dan ke sepuluh, dari 50 negara yang di telaah.

Realitas ini menjadi semakin lengkap apabila kita kaitkan dengan , *Human Development Report* Indonesia tahun 2004, yang menyatakan bahwa angka buta huruf dewasa (*adult illiteracy rate*) di Indonesia, masih mencapai 12,1%. Ini artinya, dari 100 orang dewasa Indonesia yang berusia 15 ke atas, ada 12 orang yang dinyatakan tidak bisa membaca dan menulis. Angka ini masih relatif tinggi jika kita bandingkan dengan Thailand (7,4%), Brunai Darussalam (6,1%) dan Jepang (0,0%).

Pada Tahun 2004 lalu, UNDP juga telah mengeluarkan laporannya tentang kondisi HDI (*Human Development Indeks*) di Indonesia. Dalam laporan tersebut, HDI Indonesia dinyatakan berada pada urutan ke 111 dari 175 negara. Posisi ini masih sangat tinggi jika kita bandingkan dengan Malaysia (urutan ke 59), Thailand (urutan ke 76) dan Philipina (urutan ke 83). Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya menempati satu tingkat lebih baik di bandingkan Vietnam.

Paparan diatas, setidaknya-tidak telah memberikan gambaran sekilas tentang kondisi dunia pendidikan nasional saat ini, sehingga memerlukan penanganan segera dengan tingkat keseriusan yang tinggi agar kita mampu mengejar segala kekurangan dan ketertinggalan kita. Keberadaan UU Sisdiknas NO. 20 tahun 2003, diharapkan dapat memberikan perubahan dan angin segar bagi dunia pendidikan nasional.

BUDAYA KEKERASAN ?

" I have seen the harsh behaviour of teachers in schools and colleges. Every day there are severe punishments by teachers, so we remain very afraid in class, scolds him with ugly words and teases him for being naughty or for not learning the lessons. It is very shameful as well as painful" (*Boys, 17, South and Central Asia*-laporan UNICEF).

Budaya kekerasan sepertinya, semakin hari semakin menguat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Julukan bangsa yang penug adab, sopan santun, toleran dan memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, lambat laun mulai menghilang dari khasanah kehidupan kita baik dalam konteks hidup bermasyarakat maupun berbangsa. Budaya kekerasan telah menjelma dalam berbagai bentuk, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan kita menerimanya sebagai sesuatu yang wajar.

Hampir setiap hari, kita disuguhi berbagai macam berita tentang kekerasan baik di lingkungan sekitar kita, di lingkungan rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga) maupun di institusi pendidikan yang *nota bene* adalah institusi pencetak penerus bangsa. Sedemikian parahkah tingkat moralitas bangsa kita ? sehingga segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara kekerasan ?. Konon budaya kekerasan, merupakan ciri utama dari peradaban manusia yang paling terbelakang. Akal dan hati nurani sudah tidak mendapat tempat lagi karena telah lama pergi atau membeku seperti batu.

Diakui atau tidak, budaya kekerasan dalam arti yang luas pada hakekatnya telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita dan pada umumnya telah di alami semanjak masa kanak-kanak, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Kekerasan pada anak, tidak hanya meliputi tindakan fisik saja tetapi mencakup pula kekerasan secara psikologis seperti : dimarahi, diejek, dimaki, termasuk pelecehan seksual. Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan berbagai pihak, memperlihatkan bahwa kekerasan telah menjadi budaya dari masyarakat kita.

Hasil penelitian UNICEF tahun 2002, di NTT, 2/3 anak-anak pada umumnya telah mengalami kekerasan, baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Di NTB

tahun 2003, dilaporkan 1500 anak mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Data di Center Krisis Jakarta, memperlihatkan bahwa 76% korban dari kekerasan adalah anak-anak. Begitu pula dengan hasil penelitian tahun 2006 yang dilakukan Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, Universitas Atmajaya yang bekerja sama dengan UNICEF tentang kekerasan pada anak, khususnya yang terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah, di provinsi di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara.

Hasil studi itu memperlihatkan bahwa kekerasan yang mereka alami dianggap sebagai bentuk hukuman dalam rangka mendidik anak dan sudah dianggap telah menjadi budaya mereka. Bahkan di Jawa Tengah, hasil penelitian UNICEF juga memperlihatkan 80% anak mengalami berbagai bentuk yang dapat dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak oleh guru mereka.

Dalam konteks kekerasan di sekolah, Riauskina, Djuwita dan Soesetio (2005) mendefinisikan *School Bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa-siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Mereka kemudian mengelompokkan perilaku *Bullying* ke dalam 5 katagori⁴, yaitu :

1. **Kontak fisik langsung** (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain).
2. **Kontak verbal langsung** (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gossip).
3. **Perilaku non verbal langsung** (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek,= atau mengancam; biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal).
4. **Perilaku non verbal tidk langsung** (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng).
5. **Melecehkan seksual** (kadang dikatagorikan perilaku agresif fisik atau verbal).

Pada level sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi, kita mengenal istilah MOS (Masa Orientasi Siswa) ataupun semacam OSPEK (orientasi studi dan pengenalan kampus) di level mahasiswa, sering bersingungan erat dengan hal-hal yang berkaitan dengan

⁴ Lihat Jurnal PoPsy!,- Psikologis Populer, Kamis, 26 April 2007.

kekerasan, termasuk kekerasan fisik sebagai bentuk perploncoan yang secara tradisional diwariskan dari senior ke junior. Berbagai alasan dipakai untuk melegalkan format-format seperti ini, termasuk mentolerir tindak kekerasan, untuk menegakkan disiplin maupun memperkuat rasa kebersamaan.

Apa yang terjadi di kampus IPDN, adalah contoh klasik dimana tradisi kekerasan telah menjadi bagian dari pola pendidikan itu sendiri yang dianggap legal dan benar, dengan berbagai alasan dan pembenaran. Sekali lagi ini, membuktikan bahwa paradigma kita, masih terkontaminasi oleh sebuah pemahaman bahwa kekerasan bisa ditolelir dengan mengatas namakan penegakkan disiplin maupun solidaritas kebersamaan yang salah kaprah.

Dampak terburuk dari kekerasan ini, disamping dapat menimbulkan kematian maupun cacat fisik adalah tumbuh kembangnya sang anak didik akan terganggu, sehingga ia tidak mampu mewujudkan potensi-potensi yang dimilikinya karena selalu dihindangi rasa takut dan rasa bersalah yang berlebihan.

SOLUSI : PERLU PARADIGMA BARU

UU Sistem Pendidikan Nasional NO. 20 Tahun 2003 telah mengamanatkan bahwa masalah pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ketiga komponen ini, diharapkan dapat bersinergi secara simultan dan positif, sehingga bersifat saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing.

Ketentuan ini, sebetulnya sedikit banyak mengadopsi budaya yang berkembang di masyarakat, bahwa peran keluarga, terutama orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga masih diakui dan mempunyai peranan yang cukup signifikan. Asumsi seperti ini tidaklah salah, mengingat 2/3 dari waktu yang ada, dihabiskan sang anak di rumah. Artinya, mereka akan berada di lingkungan sekolah, secara formal tidak lebih dari 8 jam sehari, 6 hari dalam seminggu dan selebihnya alokasi waktu sang anak akan dihabiskan di dalam keluarga atau masyarakat.

Komponen Orangtua

Pendidikan di lingkungan keluarga dalam masyarakat kita, telah menempatkan faktor orangtua sebagai salah satu faktor yang cukup penting dalam proses pendidikan anak dalam pengertian luas. Orangtua, dituntut untuk dapat mengalokasikan waktunya dalam

menanamkan nilai-nilai, maupun norma-norma etika dan moral bahkan tidak jarang membantu juga dalam masalah-masalah yang bersifat lebih teknis .

Dalam konteks pendidikan di lingkungan Orangtua/keluarga, setidaknya-tidaknya ada tiga fenomena yang sering terjadi. *Pertama*, pola interaksi pendidikan lebih sering bersifat pedagogi dimana kedua orang tua berperan secara sentral dengan komunikasi yang cenderung satu arah sehingga cenderung bersifat normatif. *Kedua*, dominasi *power*¹ lebih mengambil peranan penting dari pada pendekatan yang lebih bersifat “kesetaraan” sehingga tidak memungkinkan sang anak dapat mengembangkan wawasannya secara demokratis dan bebas. Berbagai bentuk hukuman yang mengarah pada kekerasan (*menampar, menjewer, memukul, menendang, mencubit, mengunci dalam kamar/kamar mandi, dsb*), masih sering kita jumpai dan dipakai sebagai alasan untuk menegakkan disiplin pada anak. *Ketiga*, faktor tuntutan hidup dan persaingan hidup yang semakin ketat maupun dinamika yang berkembang di masyarakat sekarang ini, telah memberi ruang waktu yang semakin sempit bagi para orangtua untuk memperhatikan dan memenuhi pendidikan keluarga bagi sang anak. Peran orangtua tidak jarang telah diambil alih oleh kemajuan teknologi maupun informasi, yang semakin tidak terkendali dalam era globalisasi dan internasionalisasi seperti yang terjadi saat ini.

Dalam konteks ini, peranan media elektronik (TV, Radio, Internet, *Handphone*) menjadi sebuah alternatif lain dalam menggali informasi maupun penggunaan waktu luang, tanpa kontrol yang cukup memadai sehingga memungkinkan pengaruh-pengaruh negatif begitu mudah masuk. Kasus-kasus kekerasan yang di pengaruhi oleh tayangan *Smakcdown* yang tidak jarang memakan korban, sekali lagi menegaskan lemahnya kontrol keluarga/orangtua (termasuk pemerintah) terhadap tayangan di TV yang kurang mendidik sehingga berpotensi untuk merusak akhlak dan moral para penontonnya. Oleh sebab itu, peran orangtua/keluarga perlu di maksimalkan kembali untuk membimbing dan mengawasi anak-anak, agar tidak terjerumus dalam pengaruh-pengaruh negatif maupun menjadi korban dari kekerasan itu sendiri.

Pola asuh dan pola didik juga harus dirubah dengan menekankan komunikasi dua arah dan mengedepankan dialog dari pada menekankan berbagai bentuk hukuman yang dapat menimbulkan trauma serta mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak di kemudian hari. Penegakkan disiplin tidak selalu identik dengan penerapan kekerasan.

¹ Studi yang dilakukan UNICEF baru-baru ini yang dilakukan di beberapa Negara, memperlihatkan bahwa 80 sampai 98% anak telah mengalami hukuman secara fisik di lingkungan rumah mereka dan setiap tahun, ada 133 juta smpai 275 juta anak-anak di dunia, telah mengalami kekerasan dari kedua orangtua mereka.

Komponen Masyarakat

Masyarakat pada hakekatnya adalah miniatur dari kondisi yang di alami oleh sebuah Negara. Di dalamnya mencakup faktor lingkungan sekitar, institusi lokal baik formal maupun informal serta tokoh-tokoh panutan yang sering masih menjadi acuan bagi pola pikir dan perilaku dalam masyarakat yang masih bersifat patrilineal dan transisional.

Dalam sistem pendidikan nasional, masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang wajar dan bermutu sekaligus memiliki hak untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Pada pasal 8 UU Sisdiknas, ditegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pada pasal 9, masyarakat juga dikenakan kewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kenyataan ini berarti semakin, memperkuat posisi, peran dan fungsi masyarakat sebagai sebuah komponen penting dalam proses pendidikan nasional. Oleh sebab itu, masyarakat di tuntutan untuk lebih pro aktif, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan di lingkungan masyarakat, termasuk dalam institusi pendidikan. Kontrol yang kuat serta keinginan bersama untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dalam proses pendidikan, merupakan modal awal bagi terciptanya sebuah sistem pendidikan yang jauh dari segala bentuk kekerasan.

Komponen Pemerintah (Institusi Pendidikan)

Dunia pendidikan nasional kita, sepertinya telah terkontaminasi oleh sistem kapitalisme yang sangat kuat, dimana institusi pendidikan cenderung dilihat dan diperlakukan sebagai sebuah mesin pencetak uang daripada untuk mencetak SDM manusia yang kapabel dan humanis.

Atas nama kemajuan jaman dalam upaya mempertahankan hidup (*survival*), tidak sedikit institusi pendidikan bergerak elitis, mengikuti mekanisme pasar kapitalis. dan semakin menegaskan ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada. Hal ini tercermin antara lain dalam pemandangan yang kontras dimana tidak sedikit institusi pendidikan yang dibangun dengan mewah di satu sisi dengan ruang-ruang kelas yang lapuk maupun gedung yang hampir roboh serta ketidak mampuan finansial sebagian orangtua dalam membiaya anaknya, di sisi lain.

Institusi pendidikan seolah-olah hanya berpihak pada kaum berpunya dan melupakan kaum papa dengan orientasi semata-mata untuk pencapaian kesejahteraan materi maupun kekuasaan.

Dalam konteks seperti ini, *out put* pendidikan lebih diarahkan pada pencapaian kualitas teknis formal yang lebih menitik beratkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, dan mengabaikan aspek-aspek lain yang seharusnya menyertai sang anak didik, seperti aspek etika maupun estetika. Dalam kondisi yang demikian, dunia pendidikan kita cenderung akan dilihat dan diperlakukan seperti sebuah produk ekonomi/industri, dimana tujuan akhirnya semata-mata hanya untuk memenuhi syarat-syarat yang lebih bersifat formalitas belaka, sehingga cara-cara instan pun tidak jarang ditempuh.

Perolehan ijazah menjadi tujuan utama untuk mendapatkan pengakuan legal formal, pengakuan status social, meraih kekuasaan maupun sebagai sarana untuk mencari pekerjaan yang terasa semakin sempit. Hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya suatu kecenderungan orang untuk mempunyai gelar yang sebanyak mungkin, dengan mengabaikan proses belajar yang wajar sehingga praktek-praktek jual beli ijazah/gelar, menjadi sebuah bisnis dengan mengesampingkan etika dan moral.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk di dalamnya institusi pendidikan, harus mulai menjauhkan diri dari segala bentuk praktek kekerasan atas dengan dalih apapun juga dengan melihat anak didik tidak semata-mata sebagai obyek namun harus dilihat juga sebagai subyek dari proses pendidikan itu sendiri.

Pendidikan nasional kita seharusnya tidak hanya diarahkan untuk penguasaan iptek saja, tetapi juga mencakup penguasaan terhadap etika dan estetika, sehingga tujuan akhir dari sistem pendidikan nasional kita adalah membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, dimana antara IQ (*Intelegensia Quotes*), EQ (*Emotional Quates*) dan SQ (*Spiritual Quotes*) dapat berkembang secara proporsional.

Sistem pendidikan yang cenderung telah meminggirkan kaum miskin untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang memadai, juga perlu dikaji ulang agar pemerataan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 benar-benar dapat di wujudkan. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan paradigma yang melihat institusi pendidikan sebagai suatu hal yang bersifat komprehensif, dengan menitik beratkan pada perubahan kultur dan politik yang di iringi pembaharuan di bidang hukum

Paradigma yang diperlukan adalah paradigma yang bersifat pembebasan dan pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi, transparan, kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan, baik secara empiris, etika ,maupun moral. Perilaku kekerasan di institusi pendidikan dapat di cegah apabila sistem pendidikan kita lebih bersifat terbuka sehingga dapat di kontrol oleh publik. ****

Tabel 1

PENDIDIKAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU SEKOLAH DASAR DI INDONESIA
TAHUN 2003-2004

IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI	STATUS SEKOLAH			
	NEGERI		SWASTA	
< = SLTP Keguruan	5,462	0.47	1,234	1.29
SLTA Nonkeguruan	20,267	1.75	4,923	5.16
SLTA Keguruan	456,377	39.32	37,127	38.88
PGSLP, Diploma 1	27,417	2.36	3,490	3.65
PGSLP, Diploma 2	521,893	44.96	26,999	28.27
Sarjana Muda	32,683	2.82	5,175	5.42
Sarjana	96,033	8.27	16,277	17.05
Pascasarjana	625	0.05	264	0.28
Jumlah	1,160,757	100	95,489	100